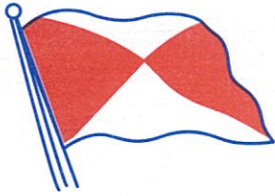


PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2022



PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

Jl. Kalibesar Timur No. 10 - 12, JAKARTA 11110, Indonesia

Telephone : +62 21 6912547 - 49 Telefax : +62 21 6901450, 6902726

Website : <http://www.bahteradhiguna.co.id>

E-mail : pelba@bahteradhiguna.co.id

INSA : 227/INSA/VII/1990

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Atas nama Dewan Direksi kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Tri Susanto
Alamat kantor : Jl. Kalibesar Timur No. 10 - 12
Jakarta Barat
Alamat domisili sesuai KTP atau : Jl. KP Buaran III RT/RW 005/015 Kel. Duren Sawit Kec. Duren
kartu identitas lain : Sawit, Jakarta Timur
Nomor telepon : (021) 6912547
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Didik Sukristiyo Yuwono
Alamat kantor : Jl. Kalibesar Timur No. 10 - 12
Jakarta Barat
Alamat domisili sesuai KTP atau : Jl. Pratista Blok E-10, RT/RW 003/018 Kel. Antapani Kidul
kartu identitas lain : Kec. Antapani, Bandung
Nomor telepon : (021) 6912547
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi:

Jakarta, 26 Mei 2023



Tri Susanto
Direktur Utama

Didik Sukristiyo Yuwono
Direktur Keuangan



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JAKARTA,
26 Mei 2023


Firman Sababalat, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.1789



Pelaporan: Bahtera Adhiguna
00962/2.1025/AU.1/02/1789-2/1/V/2023

LAPORAN POSISI KEUANGAN**31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	561.620	102.802
Piutang usaha	5	1.262.205	1.374.061
Piutang non-usaha	6	108.835	117.664
Uang muka dan biaya dibayar di muka, bagian lancar	7	30.934	8.940
Persediaan	8	59.885	45.084
Piutang sewa pembiayaan, bagian lancar	9	97.923	82.665
Pajak dibayar di muka, bagian lancar	22a	34.625	3.341
Kas yang dibatasi penggunaannya		<u>600</u>	<u>1.311</u>
Jumlah aset lancar		<u>2.156.627</u>	<u>1.735.868</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka dan biaya dibayar di muka, bagian tidak lancar	7	212.108	-
Piutang sewa pembiayaan, bagian tidak lancar	9	947.667	1.056.733
Aset tetap	10	979.560	891.445
Aset hak-guna	11	341.451	183
Investasi pada entitas asosiasi	12	36.147	32.773
Pajak dibayar di muka, bagian tidak lancar	22a	<u>5.625</u>	<u>32.541</u>
Jumlah aset tidak lancar		<u>2.522.558</u>	<u>2.013.675</u>
JUMLAH ASET		<u>4.679.185</u>	<u>3.749.543</u>

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	13	783.507	871.042
Utang lain-lain	14	464.721	245.901
Biaya yang masih harus dibayar	15	50.041	43.482
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	16	124.878	121.124
Liabilitas sewa, jangka pendek	17	262.843	94.222
Utang pajak	22b	44.599	35.871
Liabilitas imbalan pascakerja, jangka pendek		<u>558</u>	<u>287</u>
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>1.731.147</u>	<u>1.411.929</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	16	567.373	289.446
Liabilitas imbalan pascakerja, jangka panjang		4.542	4.524
Liabilitas sewa, jangka panjang	17	<u>1.073.253</u>	<u>999.862</u>
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>1.645.168</u>	<u>1.293.832</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>3.376.315</u>	<u>2.705.761</u>
EKUITAS			
Modal saham:			
Modal dasar 86.696 lembar saham, ditempatkan dan disetor penuh			
21.675 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh)			
per lembar saham	18	21.675	21.675
Tambahan modal disetor	19	33.406	33.406
Saldo laba			
- Dicadangkan		2.875	2.875
- Tidak dicadangkan		<u>1.244.914</u>	<u>985.826</u>
Jumlah ekuitas		<u>1.302.870</u>	<u>1.043.782</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>4.679.185</u>	<u>3.749.543</u>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PENDAPATAN USAHA	20	5.078.737	3.163.190
BEBAN POKOK PENDAPATAN	21	<u>(4.539.939)</u>	<u>(2.778.144)</u>
LABA BRUTO		538.798	385.046
Beban umum dan administrasi	21	(74.231)	(48.621)
Beban keuangan	23	(161.357)	(88.811)
Penghasilan keuangan		2.384	1.254
Bagian laba/(rugi) entitas asosiasi	12	10.580	(2.296)
Beban lain-lain, bersih		<u>(53.909)</u>	<u>(16.118)</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		262.265	230.454
Beban pajak penghasilan	22c	<u>(2.657)</u>	<u>(2.738)</u>
LABA TAHUN BERJALAN		<u>259.608</u>	<u>227.716</u>
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN			
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Bagian (rugi)/penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi, setelah pajak		(521)	486
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas program imbalan pascakerja, setelah pajak		<u>1</u>	<u>(625)</u>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>259.088</u>	<u>227.577</u>

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

	Modal saham	Tambah modal disetor	Saldo laba		Jumlah ekuitas
			Dicadangkan	Tidak dicadangkan	
Saldo 1 Januari 2021	21.675	33.406	2.875	758.249	816.205
Laba tahun berjalan	-	-	-	227.716	227.716
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi, setelah pajak	-	-	-	486	486
Pengukuran kembali atas program imbalan pascakerja, setelah pajak	-	-	-	(625)	(625)
Saldo 31 Desember 2021	21.675	33.406	2.875	985.826	1.043.782
Laba tahun berjalan	-	-	-	259.608	259.608
Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi, setelah pajak	-	-	-	(521)	(521)
Pengukuran kembali atas program imbalan pascakerja, setelah pajak	-	-	-	1	1
Saldo 31 Desember 2022	21.675	33.406	2.875	1.244.914	1.302.870

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba sebelum pajak penghasilan	262.265	230.454
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan aset tetap	135.444	133.520
Penyusutan aset hak-guna	28.038	638
Beban keuangan	161.357	88.811
Imbalan pascakerja	547	1.368
Bagian (laba)/rugi entitas asosiasi	(10.580)	2.296
Penghasilan keuangan	<u>(2.384)</u>	<u>(1.254)</u>
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	<u>574.687</u>	<u>455.833</u>
Perubahan modal kerja:		
Piutang usaha	111.856	(599.300)
Piutang non-usaha	8.829	(68.343)
Persediaan	(14.801)	(12.005)
Pajak dibayar di muka	76	6.108
Uang muka dan biaya dibayar di muka	(234.102)	(3.621)
Kas yang dibatasi penggunaannya	711	100
Utang usaha	(87.535)	306.575
Utang pajak	8.728	7.732
Utang lain-lain	45.795	7.758
Biaya yang masih harus dibayar	<u>12.611</u>	<u>(347)</u>
Arus kas operasi sesudah perubahan modal kerja	426.855	100.490
Pembayaran pajak penghasilan	(2.866)	(3.296)
Penerimaan pengembalian atas surat ketetapan pajak kurang bayar	3.421	-
Pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar	(7.865)	-
Pembayaran imbalan pascakerja	(261)	(970)
Penerimaan bunga	2.384	1.254
Penerimaan piutang sewa pembiayaan	93.809	41.275
Pembayaran bunga	<u>(167.338)</u>	<u>(90.450)</u>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>348.139</u>	<u>48.303</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(223.559)	(69.097)
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	<u>6.685</u>	<u>6.804</u>
Kas bersih digunakan untuk dari aktivitas investasi	<u>(216.874)</u>	<u>(62.293)</u>

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	402.805	-
Pembayaran pinjaman kepada pemegang saham	(121.124)	(142.656)
Pembayaran liabilitas sewa	(127.153)	(76.134)
Penerimaan dari <i>Notional Pooling</i>	923.025	226.395
Pembayaran untuk <i>Notional Pooling</i>	(750.000)	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>327.553</u>	<u>7.605</u>
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	458.818	(6.385)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>102.802</u>	<u>109.187</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>561.620</u>	<u>102.802</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM**a. Pendirian dan informasi umum**

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("Perusahaan") didirikan pada tahun 1961 dengan nama Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara dan merupakan kelanjutan usaha dari perusahaan maritim milik Belanda, N.V. Nederland Indonesie Steenkolen Handel Maatschap-pij ("NISHM") Tanjung Priok yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah"). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1971, nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Negara Bahtera Adhiguna dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1971. Berdasarkan akta No.34 tanggal 30 Desember 1971 dari Soeleman Ardjasmita, S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna. Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No.J.A.5/63/23 tanggal 11 Agustus 1972, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.8 tanggal 26 Januari 1973, Tambahan No.58.

Berdasarkan akta No.19 pada tanggal 30 Januari 2012 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, tentang perubahan kepemilikan dalam rangka pengalihan modal saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN. Dengan adanya pengalihan ini, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi PT Pelayaran Bahtera Adhiguna. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-04508 tanggal 9 Februari 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali, terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No.50 tanggal 23 Desember 2019 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0002103.AH.01.02 tanggal 10 Januari 2020.

Perusahaan bergerak dalam bidang transportasi bahan tambang serta layanan jasa dermaga. Entitas induk Perusahaan adalah PLN.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Jalan Kalibesar Timur No.10-12, Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang penyelenggaraan jasa angkutan laut, terutama di angkutan laut dan usaha-usaha lainnya yang menunjang tercapainya tujuan perkembangan Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah karyawan Perusahaan sebanyak 36 (2021: 38) karyawan tetap dan 33 (2021: 24) karyawan tidak tetap (tidak diaudit).

b. Lain-lain

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No.28 tanggal 27 Maret 2023 dari Muhammad Hanafi, S.H. dan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.09-0104661 tanggal 29 Maret 2023.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)
b. Lain-lain (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Komisaris Utama	: Sapto Aji Nugroho*)	Mimin Insani
Komisaris	: Stefanus Sugeng Wardoyo	Stefanus Sugeng Wardoyo
Komisaris	: Hendri Ginting*)	Poppy Sofia
Komisaris	: Bayu Adjie Megananda*)	
Direktur Utama	: Tri Susanto**)	Ruly Firmansyah
Direktur Keuangan	: Didik Sukristiyo Yuwono***)	S. Obrien Krismawanto
Direktur Operasi	: Idaman**)	Fauzan
Direktur Perencanaan dan Niaga	: Arif Yuniarto**)	

*) Berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 27 Maret 2023, dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta.

**) Berdasarkan Akta Notaris No. 27 tanggal 27 Maret 2023, dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta.

***) Berdasarkan Akta Notaris No. 57 tanggal 22 September 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Untuk memberi pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perusahaan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa *item* pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Selain yang dijelaskan di bawah, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan"
- Amandemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa"

Standar baru, amandemen, dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas Lancar atau Tidak Lancar"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil Penggunaan yang Diintensikan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK No. 73, "Sewa - Liabilitas Sewa Pada Transaksi Jual dan Sewa-balik"
- Amandemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif"
- Revisi PSAK No. 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- Revisi PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"
- Revisi PSAK No. 109, "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah"

Standar baru, amandemen, dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali untuk Amandemen PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan", Amandemen PSAK No. 73, Revisi PSAK No. 101 dan Revisi PSAK No. 109 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, dan PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen, dan revisi pada laporan keuangan Perusahaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
b. Penjabaran mata uang asing
i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang dimuat dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

	<u>2022*)</u>	<u>2021*)</u>
Dolar Amerika Serikat ("AS\$")	15.592	14.269

*) Dalam jumlah penuh

c. Transaksi pihak-pihak berelasi

Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Saldo dan transaksi yang material antara Perusahaan dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Perusahaan memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

d. Aset keuangan
i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas apakah penentuan arus kas tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan pinjaman.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**d. Aset keuangan (lanjutan)****i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)**

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Perusahaan mengklasifikasikan instrumen utang:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan keuangan dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Nilai wajar melalui komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, dimana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan keuangan dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam beban lain-lain, bersih. Pendapatan keuangan dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam beban lain-lain, bersih dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain, bersih.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**d. Aset keuangan (lanjutan)****i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)**Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam beban lain-lain, bersih dalam periode kemunculannya.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

e. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE"). Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang non-usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**f. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan (jika ada).

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya, digunakan sebagai jaminan atau yang tidak dapat digunakan secara bebas digolongkan dalam kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

g. Piutang usaha dan non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha biasa. Jika penagihan diperkirakan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi usaha biasa, jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak demikian, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi. Ketika piutang usaha atau piutang non-usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Keberhasilan penagihan kembali di kemudian hari atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan pada laba rugi.

h. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Persediaan

Suku cadang dan bahan bakar dinilai berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Suku cadang dan bahan bakar dicatat sebagai biaya produksi pada saat digunakan.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

j. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Perusahaan menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perusahaan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK 16, "Aset tetap" yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
j. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
<i>Docking</i> kapal	2,5
Kapal dan tongkang	10-25
Peralatan operasional	5
Kendaraan	5
Perlengkapan kantor	5

Masa manfaat, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 2k).

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Nilai kapal termasuk biaya *docking* dikapitalisasi pada saat terjadinya dan didepresiasi berdasarkan metode garis lurus sampai dengan *docking* berikutnya.

Pekerjaan dalam pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Untuk tujuan menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas).

Aset non-keuangan, selain *goodwill*, yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**k. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)**

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

Beban dan pemulihan penurunan nilai disajikan secara terpisah dalam laba rugi, setelah penyajian laba usaha.

l. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan sebagai pemberi sewa

Ketika Perusahaan bertindak sebagai pemberi sewa, Perusahaan akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Perusahaan membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Perusahaan sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Perusahaan menyewa aset tetap tertentu, yang kontrak sewanya dibuat untuk periode tetap dari dua hingga 14 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal dimana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Perusahaan. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Aset hak pakai didepresiasi selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa sewa dengan metode garis lurus.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**I. Sewa (lanjutan)****Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)**

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut: (lanjutan)

- Pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- Harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, dimana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Perusahaan, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Perusahaan:

- Jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- Menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Perusahaan, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan
- Membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Perusahaan dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak-guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- Biaya langsung awal; dan
- Biaya restorasi.

Aset hak-guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak-guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 2k).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**I. Sewa (lanjutan)****Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)**

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

Opsi ekstensi dan terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Perusahaan. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Jaminan nilai residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Perusahaan terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Perusahaan bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

Subsewa

Perusahaan sebagai penyewa aset tetap tertentu juga menyewakan kembali aset tetap tersebut ke penyewa. Dalam transaksi ini, Perusahaan bertindak sebagai *intermediate lessor*. Ketika *intermediate lessor* melakukan transaksi subsewa, *intermediate lessor*:

- Menghentikan pengakuan aset hak-guna untuk aset tetap tertentu yang disewakan kembali ke penyewa dan mengakui piutang sewa pembiayaan.
- Mengakui selisih antara aset hak-guna dan piutang sewa pembiayaan tersebut di laba rugi.
- Tetap mengakui liabilitas sewa yang berhubungan dengan aset tetap tertentu tersebut.
- Mengakui penghasilan keuangan dari subsewa dan beban keuangan dari sewa utamanya selama periode subsewa.

m. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok di luar kegiatan usaha biasa. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

n. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**n. Pinjaman (lanjutan)**

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan. Apabila tidak terdapat bukti bahwa kemungkinan besar akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya dibayar di muka untuk biaya keuangan dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

o. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasian. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian telah selesai.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada tahun dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

p. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Perusahaan memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

(i) Akuisisi

Investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi dengan bagian Perusahaan atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

(ii) Metode ekuitas

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan atas laba rugi entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Perusahaan atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**p. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)****(ii) Metode ekuitas (lanjutan)**

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Perusahaan atas rugi entitas asosiasi dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dalam entitas asosiasi tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Jika bukti tersebut ada, maka Perusahaan menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

(iii) Pelepasan

Investasi pada entitas asosiasi dihentikan pengakuannya apabila Perusahaan tidak lagi memiliki pengaruh signifikan dan investasi yang tersisa diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

q. Pengakuan pendapatan dan beban**Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan**

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

- i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut: (lanjutan)

- iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
- v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pendapatan dari jasa penyewaan kapal dan keagenan diakui pada periode akuntansi saat jasa tersebut diberikan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

r. Penghasilan keuangan

Penghasilan keuangan dari aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain.

s. Imbalan pascakerjaImbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Perusahaan membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**s. Imbalan pascakerja (lanjutan)**Imbalan pascakerja (lanjutan)

Perusahaan harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang ("UU") No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") (sebelum 1 Januari 2021: Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU Ketenagakerjaan") atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui sepenuhnya melalui pendapatan komprehensif lain pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk di dalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas dan pada neraca.

Iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta, dengan dasar wajib, kontraktual dan sukarela. Perusahaan tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan pascakerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar di muka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

Imbalan pascakerja jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada PKB.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun terus menerus. Tunjangan kecelakaan dinas diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris apabila karyawan meninggal dunia bukan karena kecelakaan dinas. Penghargaan kesetiaan kerja diberikan setiap delapan tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 16 tahun terus menerus.

Perhitungan imbalan pascakerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini liabilitas imbalan pascakerja pasti.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**s. Imbalan pascakerja (lanjutan)**Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Perusahaan tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") mengeluarkan siaran pers tentang "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" (PSAK 24, "Imbalan Karyawan"). Dampak perubahan perhitungan tersebut tidak material bagi Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021, oleh karena itu dampak perubahan tersebut dicatat seluruhnya dalam laporan keuangan Perusahaan tahun berjalan.

t. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan kelompok kewajiban. Walaupun kemungkinan arus keluar sehubungan dengan setiap pos kewajiban tersebut kecil, dapat terdapat kemungkinan besar dibutuhkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provisi diakui.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

u. PerpajakanPajak penghasilan final

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagian besar pendapatan Perusahaan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dimana beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**u. Perpajakan (lanjutan)**Pajak penghasilan di luar pajak final

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara dimana Perusahaan beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas asosiasi, dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak tangguhan dimana saat pembalikan perbedaan sementara dikendalikan oleh Perusahaan dan sangat mungkin perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

v. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas.

Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, Perusahaan telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Perusahaan tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan biaya tertentu selama perhitungan estimasi pajak penghasilan untuk Perusahaan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan dimana penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam tahun penentuan pajak tersebut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
 (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Estimasi masa manfaat dan nilai sisa aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap yang dimiliki Perusahaan ditentukan berdasarkan periode aset tersebut diharapkan masih dapat digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun, terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perusahaan mengestimasi masa manfaat aset tetap antara 2,5 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung KKE piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Perusahaan yang diobservasi. Perusahaan akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kas	228	135
Kas di bank	461.392	102.667
Deposito	<u>100.000</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>561.620</u>	<u>102.802</u>

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA**a. Berdasarkan pelanggan**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak berelasi	1.166.280	1.340.044
Pihak ketiga	108.817	46.909
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(12.892)</u>	<u>(12.892)</u>
Jumlah pihak ketiga - bersih	95.925	34.017
Jumlah piutang usaha - bersih	<u>1.262.205</u>	<u>1.374.061</u>

b. Berdasarkan umur

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Belum jatuh tempo	1.107.936	1.028.772
Lewat jatuh tempo		
1 s/d 90 hari	72.680	261.971
91 s/d 360 hari	61.248	70.818
Lebih dari 360 hari	<u>33.233</u>	<u>25.392</u>
	1.275.097	1.386.953
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(12.892)</u>	<u>(12.892)</u>
Jumlah piutang usaha - bersih	<u>1.262.205</u>	<u>1.374.061</u>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari piutang usaha tersebut. Manajemen juga berpendapat tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat dipulihkan.

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

6. PIUTANG NON-USAHA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak berelasi	107.782	116.188
Pihak ketiga	9.556	9.979
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(8.503)</u>	<u>(8.503)</u>
Jumlah pihak ketiga - bersih	1.053	1.476
Jumlah piutang non-usaha - bersih	<u>108.835</u>	<u>117.664</u>

Piutang non-usaha pihak berelasi terutama terdiri atas transaksi yang dapat ditagih kembali (*back charges*).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup, untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari piutang non-usaha tersebut. Manajemen juga berpendapat tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat dipulihkan.

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pembelian kapal	212.108	-
Manajemen kapal	21.461	3.040
Lain-lain	<u>9.473</u>	<u>5.900</u>
Jumlah	<u>243.042</u>	<u>8.940</u>
Dikurangi: bagian lancar	<u>(30.934)</u>	<u>(8.940)</u>
Bagian tidak lancar	<u>212.108</u>	<u>-</u>

8. PERSEDIAAN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bahan bakar dan pelumas	48.570	34.417
Suku cadang	<u>11.315</u>	<u>10.667</u>
Jumlah	<u>59.885</u>	<u>45.084</u>

Perusahaan tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

9. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Pada tahun 2011, Perusahaan menyewakan kapal milik PT Jaya Samudra Karunia Shipping ("JSK") kepada PLN Unit Tanjung Jati B ("PLN TJB") melalui mekanisme subsewa. Mengacu kepada kontrak sewa dengan JSK, masa sewa akan berakhir pada 31 Desember 2025.

Pada tahun 2021, Perusahaan menyewakan dua buah kapal milik PT Lumoso Pratama Line ("Lumoso") dan PT Indah Bima Prima ("IBP") kepada PLN TJB melalui mekanisme subsewa. Mengacu kepada kontrak sewa dengan Lumoso dan IBP, masa sewa akan berakhir pada 30 Juni 2031.

Analisis jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa pembiayaan neto adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Piutang sewa bruto:		
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	237.986	240.392
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	977.779	1.067.069
Jatuh tempo dalam waktu lima tahun	<u>399.600</u>	<u>559.440</u>
	1.615.365	1.866.901
Dikurangi: pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	<u>(569.775)</u>	<u>(727.503)</u>
Piutang sewa neto	<u>1.045.590</u>	<u>1.139.398</u>
Dikurangi: bagian lancar	<u>(97.923)</u>	<u>(82.665)</u>
Bagian tidak lancar	<u>947.667</u>	<u>1.056.733</u>

Lihat Catatan 25 untuk rincian perjanjian penting.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP

	2022			
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan				
Tanah	2.966	-	-	2.966
Bangunan	6.812	-	-	6.812
Kapal dan tongkang	1.691.215	221.737	-	1.912.952
Peralatan operasional	84	-	-	84
Kendaraan	1.415	-	-	1.415
Perlengkapan kantor	4.263	-	-	4.263
Subjumlah	1.706.755	221.737	-	1.928.492
Pekerjaan dalam pelaksanaan	-	1.822	-	1.822
Jumlah	1.706.755	223.559	-	1.930.314
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	(3.233)	(273)	-	(3.506)
Kapal dan tongkang	(806.458)	(135.087)	-	(941.545)
Peralatan operasional	(84)	-	-	(84)
Kendaraan	(1.415)	-	-	(1.415)
Perlengkapan kantor	(4.120)	(84)	-	(4.204)
Jumlah	(815.310)	(135.444)	-	(950.754)
Jumlah tercatat	891.445			979.560

	2021			
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan				
Tanah	2.966	-	-	2.966
Bangunan	6.193	45	574	6.812
Kapal dan tongkang	1.607.662	69.052	14.501	1.691.215
Peralatan operasional	84	-	-	84
Kendaraan	1.415	-	-	1.415
Perlengkapan kantor	4.263	-	-	4.263
Subjumlah	1.622.583	69.097	15.075	1.706.755
Pekerjaan dalam pelaksanaan	15.075	-	(15.075)	-
Jumlah	1.637.658	69.097	-	1.706.755
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	(2.960)	(273)	-	(3.233)
Kapal dan tongkang	(673.290)	(133.168)	-	(806.458)
Peralatan operasional	(84)	-	-	(84)
Kendaraan	(1.415)	-	-	(1.415)
Perlengkapan kantor	(4.041)	(79)	-	(4.120)
Jumlah	(681.790)	(133.520)	-	(815.310)
Jumlah tercatat	955.868			891.445

Beban penyusutan seluruhnya dialokasikan sebagai beban pokok pendapatan (Catatan 21) pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp135.444 dan Rp133.520.

Pada tahun 2022, aset tetap Perusahaan diasuransikan terhadap risiko kerugian, kecelakaan, kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.541.291 (2021: Rp1.178.006). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

11. ASET HAK GUNA

	2022		
	Saldo awal	Penambahan	Saldo akhir
Biaya perolehan			
Gedung	-	4.788	4.788
Kapal dan tongkang	-	362.727	362.727
Kendaraan	<u>1.270</u>	<u>1.791</u>	<u>3.061</u>
Jumlah	<u>1.270</u>	<u>369.306</u>	<u>370.576</u>
Akumulasi penyusutan			
Gedung	-	(133)	(133)
Kapal dan tongkang	-	(27.292)	(27.292)
Kendaraan	<u>(1.087)</u>	<u>(613)</u>	<u>(1.700)</u>
Jumlah	<u>(1.087)</u>	<u>(28.038)</u>	<u>(29.125)</u>
Jumlah tercatat	<u>183</u>		<u>341.451</u>
	2021		
	Saldo awal	Penambahan	Saldo akhir
Biaya perolehan			
Kendaraan	<u>1.270</u>	-	<u>1.270</u>
Jumlah	<u>1.270</u>	-	<u>1.270</u>
Akumulasi penyusutan			
Kendaraan	<u>(449)</u>	<u>(638)</u>	<u>(1.087)</u>
Jumlah	<u>(449)</u>	<u>(638)</u>	<u>(1.087)</u>
Jumlah tercatat	<u>821</u>		<u>183</u>

Beban penyusutan seluruhnya dialokasikan sebagai beban pokok pendapatan (Catatan 21) pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp28.038 dan Rp638.

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Rincian investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Entitas	Domisili	Jenis usaha	Tahun operasi komersial	Persentase penyertaan	
				2022	2021
Entitas asosiasi					
PT Adhi Guna Putera ("AGP")	Jakarta	Pelayaran	1987	24,98%	24,98%

AGP bergerak di bidang pengusahaan kegiatan pelabuhan dan berdomisili di Jakarta. AGP mulai melakukan operasi komersil pada tahun 1987.

AGP merupakan Perusahaan tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip dan tersedia untuk saham entitas asosiasi tersebut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2022	Dividen	Bagian atas laba bersih	Bagian atas beban komprehensif lainnya	31 Desember 2022
<u>Entitas asosiasi</u>					
AGP	32.773	(6.685)	10.580	(521)	36.147

	1 Januari 2021	Dividen	Bagian atas laba bersih	Bagian atas pendapatan komprehensif lainnya	Penyesuaian atas kesalahan	Penyesuaian penerapan PSAK	31 Desember 2021
<u>Entitas asosiasi</u>							
AGP	41.172	(6.103)	8.914	486	(7.147)	(4.549)	32.773

Ringkasan informasi keuangan AGP, entitas asosiasi yang tercatat menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

	2022	2021
<u>Aset</u>		
Aset lancar	319.429	281.607
Aset tidak lancar	409.576	273.297
Jumlah	729.005	554.904
<u>Liabilitas</u>		
Liabilitas jangka pendek	(241.072)	(198.912)
Liabilitas jangka panjang	(343.230)	(224.796)
Jumlah	(584.302)	(423.708)
Aset bersih	144.703	131.196
% kepemilikan efektif	24,98%	24,98%
Bagian Perusahaan atas aset bersih entitas asosiasi	36.147	32.773

	2022	2021
Pendapatan	612.005	458.636
Harga pokok pendapatan	(480.095)	(352.913)
Beban umum dan administrasi	(81.317)	(57.275)
Pendapatan lain-lain	540	682
Laba usaha	51.133	49.130
Beban pajak penghasilan	(8.778)	(13.445)
Laba tahun berjalan	42.355	35.685
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain	(2.084)	1.945
Jumlah laba komprehensif	40.271	37.630
Dividen yang terutang oleh entitas asosiasi	6.685	6.103

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG USAHA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak berelasi	123.324	66.240
Pihak ketiga		
PT Patria Maritime Lines	85.836	29.126
PT Pelayaran Mana Lagi	64.771	90.121
PT Kapuas Jaya Samudera	46.080	101.947
PT Bintang Samudera Mandiri Tbk	36.236	-
PT Pancaran Samudera Transport	31.762	30.033
PT Dharmalancar Sejahtera	29.930	44.912
PT Trans Power Marine Tbk	28.871	27.522
PT Dwi Jaya Samudra	27.917	5.287
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp25.000)	308.780	475.854
Jumlah pihak ketiga	660.183	804.802
Jumlah	<u>783.507</u>	<u>871.042</u>

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

14. UTANG LAIN-LAIN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak berelasi	450.016	234.092
Pihak ketiga	14.705	11.809
Jumlah	<u>464.721</u>	<u>245.901</u>

Pada tanggal 13 Agustus 2021, Perusahaan melakukan Perjanjian Pelayanan Jasa *Notional Pooling* dengan PLN dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Adapun perjanjian ini adalah untuk menyediakan layanan manajemen integrasi kas dalam rangka memfasilitasi kebutuhan PLN grup guna mengelola likuiditas keuangan secara efisien. Saldo *Notional Pooling* Perusahaan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp399.420 (2021: Rp226.395).

Perjanjian ini tidak mengatur pembatasan yang harus dipenuhi Perusahaan dan tidak dijamin dengan aset tertentu yang dimiliki Perusahaan.

Rincian mutasi *Notional Pooling* untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal	226.395	-
Arus kas:		
- Penerimaan	923.025	226.395
- Pembayaran kembali	(750.000)	-
Jumlah	<u>399.420</u>	<u>226.395</u>

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak berelasi		
Bunga pinjaman jangka panjang	11.721	3.069
Keagenan dan administrasi	<u>1.088</u>	<u>1.611</u>
Jumlah pihak berelasi	<u>12.809</u>	<u>4.680</u>
Pihak ketiga		
Administrasi kapal	17.626	24.753
Bonus dan insentif kerja	11.680	13.129
Lain-lain	<u>7.926</u>	<u>920</u>
Jumlah pihak ketiga	<u>37.232</u>	<u>38.802</u>
Jumlah	<u>50.041</u>	<u>43.482</u>

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Jumlah pokok pinjaman	692.251	410.570
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(124.878)</u>	<u>(121.124)</u>
Bagian jangka panjang	<u>567.373</u>	<u>289.446</u>

Pinjaman ini merupakan pinjaman pemegang saham ("SHL") yang diberikan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

2022					
	<u>Tanggal perjanjian</u>	<u>Bagian jatuh tempo dalam satu tahun</u>	<u>Bagian jangka panjang</u>	<u>Tingkat bunga efektif per tahun</u>	<u>Periode</u>
SHL 2	8 Juni 2012	29.349	-	9,88%	2013-2023
SHL 3	21 November 2014	26.144	32.680	11,52%	2014-2025
SHL 4	20 Mei 2019	12.981	71.394	9,84%	2019-2029
SHL 5	10 Desember 2019	16.124	100.775	8,63%	2019-2030
SHL 6	13 Juni 2022	<u>40.280</u>	<u>362.524</u>	8,67%	2022-2032
Total		<u>124.878</u>	<u>567.373</u>		

2021					
	<u>Tanggal perjanjian</u>	<u>Bagian jatuh tempo dalam satu tahun</u>	<u>Bagian jangka panjang</u>	<u>Tingkat bunga efektif per tahun</u>	<u>Periode</u>
SHL 1	28 September 2011	7.177	-	12,24%	2011-2022
SHL 2	8 Juni 2012	58.698	29.349	9,88%	2013-2023
SHL 3	21 November 2014	26.144	58.824	11,52%	2014-2025
SHL 4	20 Mei 2019	12.981	84.374	9,84%	2019-2029
SHL 5	10 Desember 2019	<u>16.124</u>	<u>116.899</u>	8,63%	2019-2030
Total		<u>121.124</u>	<u>289.446</u>		

Beban keuangan pinjaman SHL tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp40.582 dan Rp47.808 (Catatan 23).

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. LIABILITAS SEWA

Pembayaran minimum atas kewajiban sewa pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan jatuh tempo

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:		
Tidak lebih dari satu tahun	348.620	183.179
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	1.059.959	867.120
Lebih dari lima tahun	<u>362.206</u>	<u>507.089</u>
Jumlah pembayaran minimum kewajiban sewa	1.770.785	1.557.388
Dikurangi diskonto	<u>(434.689)</u>	<u>(463.304)</u>
Nilai kini pembayaran minimum	1.336.096	1.094.084
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(262.843)</u>	<u>(94.222)</u>
Bagian jangka panjang	<u>1.073.253</u>	<u>999.862</u>

Berdasarkan pemberi sewa

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Nilai kini pembayaran minimum sewa		
Pihak berelasi	<u>98.836</u>	-
Pihak ketiga		
Lumoso	681.698	468.567
IBP	438.152	468.567
JSK	111.204	156.798
Lain-lain	<u>6.206</u>	<u>152</u>
Jumlah pihak ketiga	<u>1.237.260</u>	<u>1.094.084</u>
Jumlah	<u>1.336.096</u>	<u>1.094.084</u>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(262.843)</u>	<u>(94.222)</u>
Bagian jangka panjang	<u>1.073.253</u>	<u>999.862</u>

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

18. MODAL SAHAM

	<u>2022 dan 2021</u>		
<u>Pemegang saham</u>	<u>Jumlah saham*)</u>	<u>Persentase kepemilikan</u>	<u>Jumlah ekuitas</u>
PLN	21.674	99,99%	21.674
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN	<u>1</u>	<u>0,01%</u>	<u>1</u>
Jumlah	<u>21.675</u>	<u>100,00%</u>	<u>21.675</u>

*) Dalam jumlah penuh

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MODAL SAHAM (lanjutan)
Cadangan wajib

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan wajib sampai cadangan menjadi paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu tertentu yang ditetapkan untuk pembentukan cadangan wajib tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan belum membentuk cadangan wajib sebesar 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 31 Desember 2008, melalui perjanjian No.A.2420/SP.904/DIRUT/2008, PLN memberikan fasilitas dana talangan (*bridging finance*) kepada Perusahaan dengan jumlah maksimum sebesar Rp30.900 untuk keperluan restrukturisasi Sumber Daya Manusia ("SDM") dan *docking* KM Adhiguna Tarahan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengambilalihan/akuisisi seluruh saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan oleh PLN. Terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sampai dengan tanggal selesai dilakukannya proses akuisisi oleh PLN, maka dana talangan yang telah diterima oleh Perusahaan baik sebagian maupun seluruhnya tidak wajib dikembalikan kepada PLN selama proses akuisisi.

Perjanjian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui adendum No.A.1067/SP.904/Dirut-2012 tanggal 16 Mei 2012 yang menyatakan antara lain bahwa proses akuisisi Perusahaan oleh PLN telah selesai dan untuk dana talangan yang telah digunakan oleh Perusahaan sebesar Rp33.406 dikonversikan menjadi tambahan penyertaan modal disetor PLN ke Perusahaan.

20. PENDAPATAN USAHA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak berelasi		
Sewa kapal	4.723.720	3.021.232
Bunga sewa	157.728	101.293
Jasa manajemen	<u>25</u>	<u>507</u>
Jumlah pihak berelasi	<u>4.881.473</u>	<u>3.123.032</u>
Pihak ketiga		
Sewa kapal	196.389	40.158
Jasa manajemen	<u>875</u>	<u>-</u>
Jumlah pihak ketiga	<u>197.264</u>	<u>40.158</u>
Jumlah	<u>5.078.737</u>	<u>3.163.190</u>

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. BEBAN

Beban Perusahaan berdasarkan sifat transaksinya adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Sewa kapal	3.606.009	2.034.764
Bahan bakar dan pelumas	320.006	249.469
Bongkar muat	168.104	110.529
Penyusutan aset tetap	135.444	133.520
Suku cadang dan kebutuhan kapal lainnya	86.104	79.207
Beban pajak final	58.404	36.182
Jasa manajemen perkapalan	53.841	46.681
Asuransi kapal	41.626	23.466
Gaji dan kesejahteraan karyawan	32.309	18.889
Penyusutan aset hak guna	28.038	638
Biaya administrasi kapal	22.930	31.576
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	61.355	61.844
Jumlah	<u>4.614.170</u>	<u>2.826.765</u>

Beban tersebut di atas disajikan sebagai berikut dalam laporan laba rugi:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Beban pokok pendapatan	4.539.939	2.778.144
Beban umum dan administrasi	74.231	48.621
Jumlah	<u>4.614.170</u>	<u>2.826.765</u>

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

22. PERPAJAKAN**a. Pajak dibayar di muka**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pembayaran di muka atas		
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB")	36.985	32.541
Pajak penghasilan ("PPh") Pasal 15	3.265	3.341
Jumlah	<u>40.250</u>	<u>35.882</u>
Dikurangi: bagian lancar	<u>(34.625)</u>	<u>(3.341)</u>
Bagian tidak lancar	<u>5.625</u>	<u>32.541</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)**b. Utang pajak**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PPh Badan	103	312
Pajak lainnya:		
- Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	24.820	18.349
- PPh Pasal 15	15.041	15.490
- Lain-lain	<u>4.635</u>	<u>1.720</u>
Jumlah	<u>44.599</u>	<u>35.871</u>

c. Beban pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>262.265</u>	<u>230.454</u>
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(5.018.549)	(3.009.033)
Beban terkait pajak penghasilan final	4.721.868	2.769.605
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	<u>46.495</u>	<u>21.419</u>
Penghasilan kena pajak	<u>12.079</u>	<u>12.445</u>
Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:		
Beban pajak kini	<u>2.657</u>	<u>2.738</u>
Dikurangi pembayaran pajak di muka:		
- PPh Pasal 23	(2.175)	(1.776)
- PPh Pasal 25	<u>(379)</u>	<u>(650)</u>
Kurang bayar pajak penghasilan badan	<u>103</u>	<u>312</u>

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut dapat disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke Kantor Pajak.

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak penghasilan dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	262.265	230.454
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	57.698	50.700
Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final - setelah dikurangi beban terkait	(65.270)	(52.674)
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	<u>10.229</u>	<u>4.712</u>
Jumlah beban pajak penghasilan	<u>2.657</u>	<u>2.738</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)**d. Ketetapan pajak**

Jenis pajak	Tahun pajak	Surat pajak	Tanggal surat	Jumlah yang diperkarakan	Status
PPN, PPh badan dan lain-lain	2017	SKPKB dan Surat Tagihan Pajak	Februari - Desember 2019	Rp36.985	Permohonan pengurangan tahap dua yang diajukan pada tanggal 18 Agustus 2022

Manajemen telah melakukan analisis terhadap posisi perpajakannya dan berkeyakinan bahwa hasil akhir dari pemeriksaan pajak di atas tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas Perusahaan.

e. Tarif pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah disahkan. UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, dengan demikian tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%, serta Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung dan menyetorkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

23. BEBAN KEUANGAN

	2022	2021
Liabilitas sewa	93.451	41.003
Pinjaman pemegang saham	40.582	47.808
<i>Notional Pooling</i>	27.324	-
Jumlah beban keuangan	161.357	88.811

Lihat Catatan 24 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**Sifat hubungan berelasi**

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Sifat transaksi
PLN	Entitas Induk Perusahaan	Piutang usaha, piutang non-usaha, piutang sewa pembiayaan, transaksi penjualan jasa, utang lain-lain, pinjaman kepada pemegang saham, penghasilan keuangan, transaksi pembelian jasa, beban keuangan, biaya yang masih harus dibayar
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN	Pemegang saham Perusahaan	Pemberi modal
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan rekening bank dan setara kas
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan rekening bank dan setara kas
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan rekening bank
PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI") (dahulu PT PLN Batubara)	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Piutang usaha, transaksi penjualan jasa, utang lain-lain
PT Sumber Segara Primadaya ("S2P")	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Piutang usaha, transaksi penjualan jasa
PT PLN Nusantara Power ("PNP") (dahulu PT Pembangkitan Jawa Bali)	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Piutang usaha, transaksi penjualan jasa
PT PLN Indonesia Power ("PIP") (dahulu PT Indonesia Power)	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Piutang usaha, utang lain-lain, transaksi penjualan jasa, transaksi pembelian jasa
PT Banyan Koalindo Lestari ("BKL")	Entitas anak EPI, entitas sepengendali dengan Perusahaan	Piutang usaha
AGP	Entitas asosiasi	Investasi pada asosiasi, piutang non-usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang usaha, transaksi pembelian jasa, piutang usaha, transaksi penjualan jasa
PT Haleyora Powerindo	Entitas anak PT Haleyora Power, entitas sepengendali dengan Perusahaan	Utang lain-lain, transaksi pembelian jasa, biaya yang masih harus dibayar
PT PLN ICON Plus ("ICON") (dahulu PT Indonesia Comnets Plus)	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Utang lain-lain, transaksi pembelian jasa
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Piutang usaha, utang usaha, transaksi penjualan jasa, transaksi pembelian jasa, liabilitas sewa, beban keuangan
PT PLN SC	Entitas anak PNP, entitas sepengendali dengan Perusahaan	Utang usaha, transaksi pembelian jasa, utang lain-lain
PT PJB Service	Entitas anak PNP, entitas sepengendali dengan Perusahaan	Utang usaha, transaksi pembelian jasa, utang lain-lain
PT Pertamina Patra Niaga	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Utang usaha, transaksi pembelian barang
PT PLNE	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Transaksi pembelian jasa

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

	Catatan	2022	2021
Kas dan setara kas	4		
Bank Mandiri		369.374	49.680
Bank Negara Indonesia		191.098	52.074
Bank Rakyat Indonesia		920	913
Jumlah		561.392	102.667

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)**

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Piutang usaha	5		
PLN		769.415	807.875
EPI		175.055	390.424
PIP		139.869	73.829
S2P		71.567	43.287
PNP		4.461	8.053
AGP		3.585	-
PT Djakarta Lloyd (Persero)		2.328	10.605
BKL		-	5.971
Jumlah		1.166.280	1.340.044
Piutang non-usaha	6		
PLN		79.650	79.296
AGP		28.132	36.892
Jumlah		107.782	116.188
Piutang sewa pembiayaan	9		
PLN		1.045.590	1.139.398
Utang usaha	13		
AGP		65.371	56.417
PT Pertamina Patra Niaga		47.077	-
PT Djakarta Lloyd (Persero)		10.876	8.106
PT PJB Service		-	1.574
PT PLN SC		-	143
Jumlah		123.324	66.240
Liabilitas sewa	17		
PT Djakarta Lloyd (Persero)		98.836	-
Utang lain-lain	14		
PLN		399.435	231.917
EPI		45.750	-
PT Haleyora Powerindo		1.403	358
ICON		1.235	876
PT PLN SC		989	-
PT PJB Service		669	-
PIP		535	941
Jumlah		450.016	234.092
Biaya yang masih harus dibayar	15		
PLN		12.526	3.069
AGP		283	1.393
PT Haleyora Powerindo		-	218
Jumlah		12.809	4.680
Pinjaman jangka panjang	16		
PLN		692.251	410.570
Pendapatan usaha	20		
PLN		3.595.073	1.860.986
EPI		685.608	824.168
PIP		472.512	291.555
S2P		106.665	104.686
PNP		13.507	29.084
AGP		5.780	-
PT Djakarta Lloyd (Persero)		2.328	12.553
Jumlah		4.881.473	3.123.032

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)**

	Catatan	2022	2021
Beban pokok pendapatan	21		
PT Pertamina Patra Niaga		109.872	-
AGP		97.470	113.534
PT Djakarta Lloyd (Persero)		42.954	40.182
PT PJB Service		3.834	1.574
PT PLN SC		989	-
PIP		-	5.588
Jumlah		255.119	160.878
Beban umum dan administrasi	21		
PT Haleyora Powerindo		4.401	2.715
ICON		2.356	1.518
PLNE		359	-
PLN		68	-
Jumlah		7.184	4.233
Beban keuangan	23		
PLN		67.906	47.808
PT Djakarta Lloyd (Persero)		1.542	-
Jumlah		69.448	47.808

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.086 dan Rp5.739. Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan pascakerja jangka pendek.

25. PERJANJIAN PENTING**a. Pengangkutan batubara**

Kontrak signifikan pengangkutan batubara yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pelanggan	Tanggal perjanjian	Jumlah pengangkutan batubara per tahun (dalam metrik ton)	Periode perjanjian
PLN	27 Januari 2011	Sesuai kebutuhan	2011 - 2031
	29 Agustus 2012	3.600.000	2012 - 2032
	16 April 2021	Sesuai kebutuhan	2021 - 2031
S2P	10 September 2012	500.000	2012 - 2026
PIP	19 Maret 2013	2.780.885 - 5.200.000	2013 - 2025
	16 September 2014	1.500.000	2014 - 2023
BKL	19 Agustus 2019	3.500 - 12.500	2019 - 2024
EPI	31 Maret 2022	1.680.019	2022
PT Paiton Energy	1 Januari 2022	1.500.000	2022 - 2027

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
b. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (“BBM”)

Perusahaan melalui PLN dan PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”) mengadakan Perjanjian Jual Beli BBM tanggal 16 Mei 2007. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Adendum VIII tanggal 8 Februari 2022, yang mengatur sebagai berikut:

1. Terhitung sejak 1 September 2021, seluruh tanggung jawab, hak dan kewajiban Pertamina berdasarkan perjanjian dialihkan kepada PT Pertamina Patra Niaga.
2. Menyepakati bahwa Perusahaan termasuk dalam lingkup fasilitas penunjang PLN terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2023.
3. Perubahan formulasi harga BBM yang berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

c. Sewa kapal

Kontrak signifikan sewa kapal dengan pemberi sewa yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pemberi sewa	Tanggal perjanjian	Nama kapal	Periode perjanjian
JSK Lumoso	27 Januari 2011	MV Kartini Samudera	2011 - 2025
	27 Agustus 2021	MV Lumoso Pratama	2021 - 2031
	17 Oktober 2022	MV Lumoso Raya	2022 - 2027
IBP PT Djakarta Lloyd (Persero)	27 Agustus 2021	MV Bulk Batavia	2021 - 2031
	11 Oktober 2022	MV Dharma Lautan Ruby	2022 - 2023
	11 Oktober 2022	MV Dharma Lautan Intan	2022 - 2023

26. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, kas yang dibatasi penggunaannya dan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp2.978.850 (2021: Rp2.735.236) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa sebesar Rp3.314.936 (2021: Rp2.651.950) sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)****i. Manajemen risiko mata uang asing**

Perusahaan melakukan sejumlah transaksi dalam mata uang asing. Akibatnya, timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga risiko mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Perusahaan untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo *item* moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

	2022	
	Dampak terhadap laba setelah pajak	
	AS\$	
	+10%	-10%
Aset keuangan		
Kas dan setara kas	260	(260)
	2021	
	Dampak terhadap laba setelah pajak	
	AS\$	
	+10%	-10%
Aset keuangan		
Kas dan setara kas	527	(527)

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Per tanggal 31 Desember 2022, manajemen percaya risiko tingkat suku bunga adalah minimal dikarenakan Perusahaan hanya terekspos risiko tingkat suku bunga melalui saldo kas di bank dan pinjaman dari pemegang saham.

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") dengan semua variabel lainnya dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat suku bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jika suku bunga mengalami kenaikan 50 basis poin dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah Rp2.170 (2021: Rp2.448). Sebaliknya jika suku bunga mengalami penurunan 50 basis poin, dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak akan lebih tinggi Rp2.170 (2021: Rp2.448).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)****iii. Manajemen risiko kredit**

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan timbul terutama atas piutang usaha dari pelanggan. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan setara kas, Perusahaan mengelola rekening pada beberapa bank dengan reputasi baik dengan tujuan meminimalkan risiko kredit dan untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi. Perusahaan menempatkan dana pada beberapa bank yang kredibel (Catatan 4).

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk KKE mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit. Pada tanggal 31 Desember 2022, total maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp2.978.621 (2021: Rp2.735.099) yang terutama berasal dari kas dan setara kas di bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang non-usaha dan piutang sewa pembiayaan.

Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang dapat terjadi karena meningkatnya eksposur risiko kredit.

Pelanggan Perusahaan adalah PLN grup. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena risiko kegagalan kredit PLN rendah dimana Perusahaan telah secara legal terikat dalam perjanjian dengan PLN grup untuk sewa kapal dan tongkang.

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Kualitas kredit aset keuangan Perusahaan dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat internal.

Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan Sistem Peringkat Perusahaan. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit dan Sistem Peringkat Perusahaan dinilai sebagai berikut:

(a) Tingkat tinggi

Aset keuangan tingkat tinggi meliputi kas dan setara kas di bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh sebab itu, risiko kredit adalah minimal. Untuk piutang usaha, pelanggan maupun pihak berelasi dapat diberi peringkat tingkat tinggi jika tidak memiliki kesulitan keuangan, tidak terjadi pelanggaran kontrak, tidak ada pemberian keringanan dan memiliki kelangsungan usaha.

(b) Tingkat rendah

Aset keuangan peringkat rendah termasuk piutang usaha yang tidak diklasifikasikan sebagai tingkat tinggi. Untuk piutang usaha, pelanggan dapat diberi peringkat rendah jika pelanggan memiliki kesulitan keuangan, melakukan pelanggaran kontrak, menerima pemberian keringanan, dan tidak memiliki kelangsungan usaha.

Per 31 Desember 2022 dan 2021, kualitas kredit semua aset keuangan Perusahaan berada dalam klasifikasi tingkat tinggi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)****iv. Manajemen risiko likuiditas**

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan simpanan dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan diwajibkan untuk membayar. Tanggal jatuh tempo kontraktual berdasarkan pada tanggal paling awal dimana Perusahaan diwajibkan untuk membayar.

	2022				Jumlah
	Dalam satu tahun	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun	Lebih dari lima tahun	
Utang usaha	783.507	-	-	-	783.507
Liabilitas sewa	348.620	494.767	565.191	362.207	1.770.785
Utang lain-lain	464.721	-	-	-	464.721
Biaya yang masih harus dibayar	38.361	-	-	-	38.361
Pinjaman jangka panjang	181.502	361.034	262.975	142.187	947.698
Jumlah	1.816.711	855.801	828.166	504.394	4.005.072

	2021				Jumlah
	Dalam satu tahun	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun	Lebih dari lima tahun	
Utang usaha	871.042	-	-	-	871.042
Liabilitas sewa	183.179	366.357	355.880	651.972	1.557.388
Utang lain-lain	245.901	-	-	-	245.901
Biaya yang masih harus dibayar	30.353	-	-	-	30.353
Pinjaman jangka panjang	155.238	228.826	107.499	28.134	519.697
Jumlah	1.485.713	595.183	463.379	680.106	3.224.381

c. Manajemen modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**c. Manajemen modal (lanjutan)**

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

d. Estimasi nilai wajar

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

27. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

	2022				31 Desember 2022
	31 Desember 2021	Arus kas masuk	Arus kas keluar	Sewa baru	
Pinjaman jangka panjang kepada pemegang saham	410.570	402.805	(121.124)	-	692.251
Liabilitas sewa	1.094.084	-	(127.153)	369.165	1.336.096
<i>Notional Pooling</i>	226.395	923.025	(750.000)	-	399.420
	2021				31 Desember 2021
	31 Desember 2020	Arus kas masuk	Arus kas keluar	Sewa baru	
Pinjaman jangka panjang kepada pemegang saham	553.226	-	(142.656)	-	410.570
Liabilitas sewa	212.127	-	(76.134)	958.091	1.094.084
<i>Notional Pooling</i>	-	226.395	-	-	226.395

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. REKLASIFIKASI

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 telah direklasifikasi agar konsisten dengan presentasi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Rincian akun-akun yang direklasifikasi adalah sebagai berikut:

	Sebelum reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah reklasifikasi
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			
Pendapatan usaha	3.061.897	101.293	3.163.190
Penghasilan keuangan	102.547	(101.293)	1.254
Laporan arus kas			
<u>Perubahan modal kerja</u>			
Utang lain-lain	234.153	(226.395)	7.758
<u>Arus kas dari aktivitas pendanaan</u>			
Penerimaan dari <i>Notional Pooling</i>	-	226.395	226.395

29. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
a. Pembentukan struktur *subholding*

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PLN Masa/Tahap *Legal End-State* serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta. PLN membentuk empat *subholding* yang terdiri dari:

1. Dua *subholding* di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PNP dan PIP;
2. Satu *subholding* di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu EPI; dan
3. Satu *subholding* untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan (*Beyond kWh*), yaitu bernama ICON.

Sebagai tindak lanjut pembentukan *subholding* PLN tersebut sesuai dengan Akta Notaris No. 75 tanggal 30 Desember 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta Selatan tentang:

1. Persetujuan pengalihan saham PLN sejumlah 21.674 saham atau setara 99.99% dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan kepada EPI melalui penyertaan modal non tunai (*inbreg*);
2. Persetujuan pengambilalihan Perusahaan oleh EPI sebagai akibat dari penyertaan modal non tunai (*inbreg*).

Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0000027 tanggal 1 Januari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000016.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 1 Januari 2023. Keputusan ini akan efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

b. Penerimaan pengembalian atas SKPKB

Pada bulan Januari sampai Maret 2023, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak atas keputusan permohonan pengurangan tahap dua yang diajukan pada tanggal 18 Agustus 2022.

Dalam keputusannya, Perusahaan menerima pengembalian senilai total Rp31.360, sehingga nilai sisa SKPKB 2017 Perusahaan adalah Rp5.625 yang kemudian diajukan upaya hukum lanjutan berupa gugatan ke pengadilan pajak yang telah diajukan pada bulan Maret dan April 2023.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

c. Kontrak sewa kapal

Pada tanggal 24 Februari 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara Menggunakan Skema Time Charter Kapal (Supramax) dengan konsorsium PT Pelita Bara Samudera dan PT Prima Maritim Bahari, dimana Perusahaan menyewa dua unit kapal supramax dengan nilai sewa masing-masing Rp300.000 dengan jangka waktu perjanjian selama lima tahun.

30. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2023.